

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

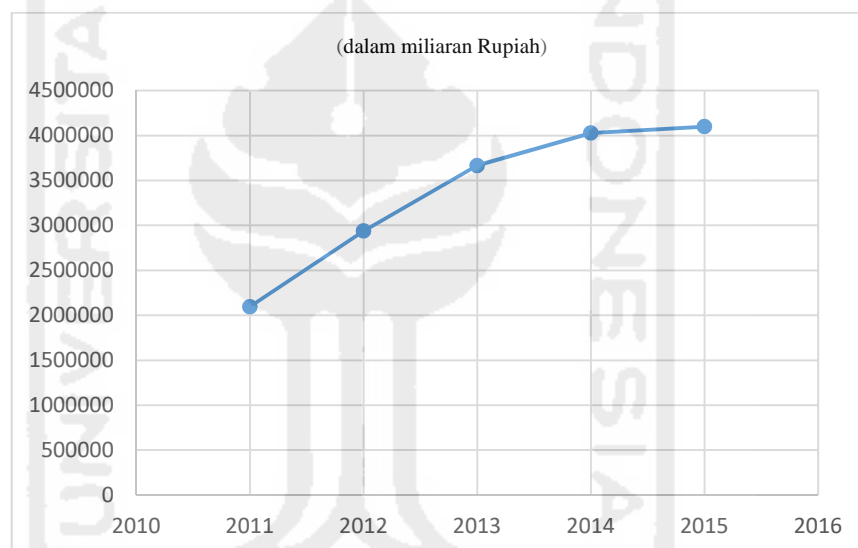
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sebagai lembaga yang memiliki peran strategis dalam pendanaan untuk usaha mikro, kecil dan menengah, hal ini sesuai dengan PBI No, 11/23/PBI/2009. Selain itu, Dalam melaksanakan perannya sebagai lembaga intermediasi yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana dan menyalurkannya kepada masyarakat yang kekurangan dana, maka BPRS harus terus meningkatkan efisiensi kinerjanya agar mampu bertahan dalam menghadapi ketatnya persaingan industri keuangan di Indonesia. Perkembangan perbankan syariah dapat dinilai dari jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK), biaya operasional lainnya, pembiayaan yang disalurkan, aktiva lancar dan pendapatan operasional lainnya.

1. Perkembangan Dana Pihak Ketiga

Pola gambaran untuk menilai perkembangan Bank Perbiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dapat dinilai dari pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun. Peningkatan jumlah DPK yang dimiliki BPRS menunjukkan adanya peningkatan aktivitas dan kegiatan BPRS di Indonesia, khususnya pada fungsi intermediasi sebagai penghimpun dana dari masyarakat. Dana Pihak Ketiga terdiri dari tabungan mudharabah, tabungan wadi'ah dan deposito mudharabah.

Dana Pihak Ketiga BPRS pada tahun 2011 hingga 2015 mengalami peningkatan yang cukup baik dengan rata-rata sebesar 19,1%. Hal ini disebabkan oleh kemampuan BPRS yang berhasil mempertahankan tingkat bagi hasil yang kompetitif sehingga dapat mempertahankan nasabah lama dan mampu menarik nasabah baru. Perkembangan DPK yang dimiliki oleh BPRS dapat dilihat pada gambar 4.1 di bawah ini:

Gambar 4.1
Perkembangan DPK BPRS Indonesia

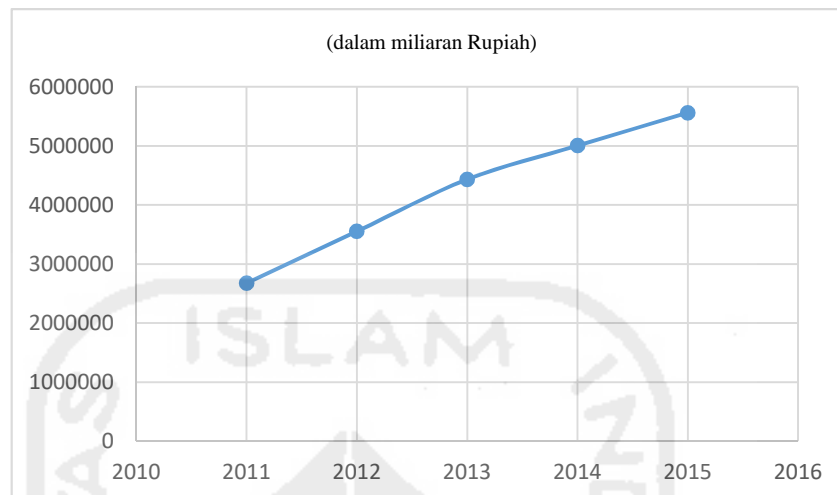


Sumber : Data diolah dari Statistik Perbankan Syariah 2015

2. Perkembangan Penyaluran Pembiayaan

Gambaran perkembangan penyaluran pembiayaan BPRS pada tahun 2011 hingga tahun 2015 mengalami peningkatan dengan rata-rata sebesar 20,3%. Jenis pembiayaan yang diberikan BPRS di Indonesia didominasi pembiayaan modal kerja. Perkembangan penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh BPRS dapat dilihat pada gambar 4.2 di bawah ini:

Gambar 4.2
Perkembangan Penyaluran Pembiayaan BPRS Indonesia

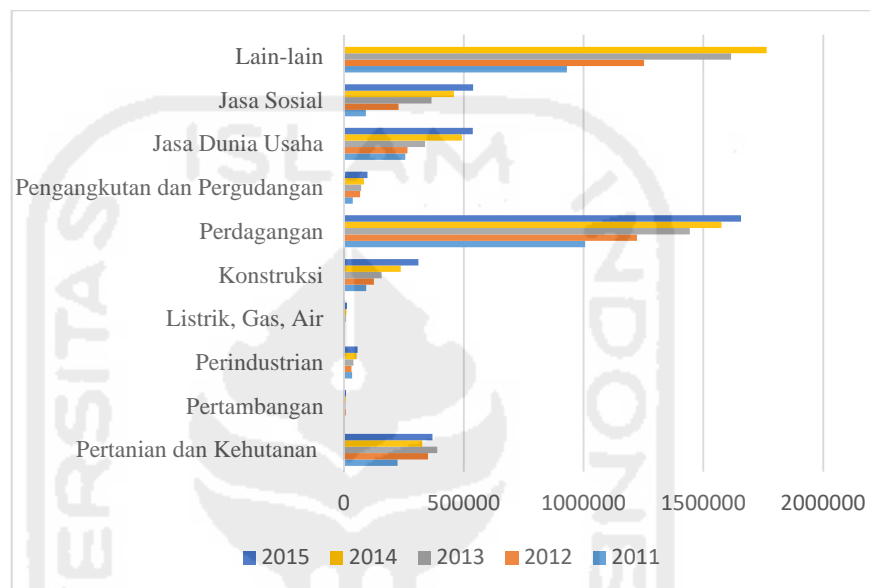


Sumber : Data diolah dari Statistik Perbankan Syariah 2015

Pertumbuhan pembiayaan BPRS di Indonesia pada sektor ekonomi juga mengalami peningkatan yang cukup positif. Pembiayaan terbesar pada tahun 2011 hingga tahun 2015 ada pada sektor lain-lain dengan rata-rata sebesar Rp 1.507 triliun, perdagangan dengan rata-rata sebesar Rp 1.380 triliun, jasa dunia usaha dengan rata-rata sebesar Rp 377.683 miliar, jasa sosial dengan rata-rata sebesar Rp 336.278 miliar, pertanian dan kehutanan dengan rata-rata sebesar Rp 320.018 miliar, konstruksi dengan rata-rata sebesar Rp 184.419 miliar, pengangkutan dan pergudangan dengan rata-rata sebesar Rp 71.093 miliar, perindustrian dengan rata-rata sebesar Rp 42.780 miliar. sedangkan pembiayaan dengan proporsi paling minim berada pada sektor gas, listrik dan air dengan rata-rata sebesar Rp 7.114 miliar dan pertambangan dengan rata-rata sebesar Rp 6.317 miliar. Pada gambar 4.3 ini dapat dilihat pembiayaan yang disalurkan oleh Bank

Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia pada sektor ekonomi sebagai berikut:

Gambar 4.3
Pertumbuhan Penyaluran Pembiayaan BPRS Berdasarkan Sektor Ekonomi Tahun 2011 sampai dengan 2015

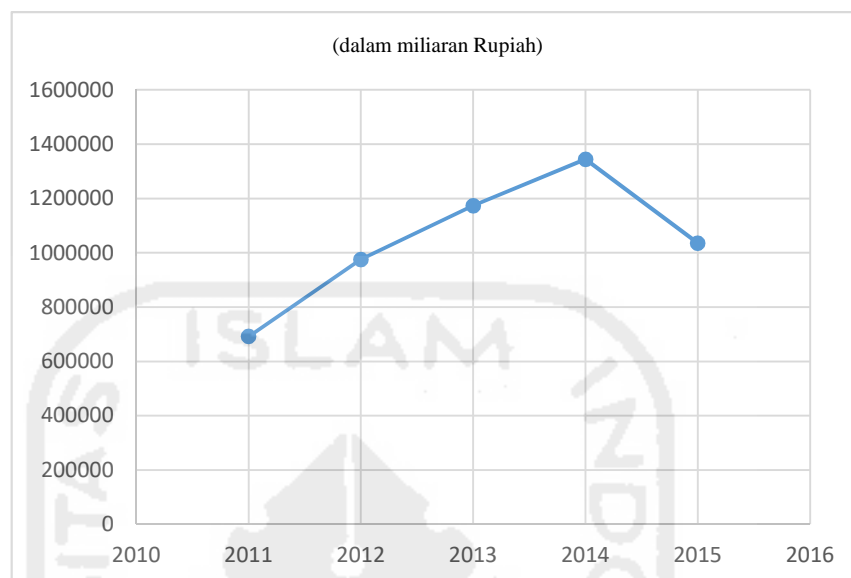


Sumber : Data diolah dari Statistik Perbankan Syariah 2015

3. Perkembangan Aset (Aktiva Lancar)

Perkembangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia dapat dilihat pula dari pertumbuhan total aset (aktiva) yang dimiliki BPRS. Total aset lancar merupakan aktiva yang dimiliki oleh BPRS yang terdiri atas kas, penempatan pada Bank Indonesia, penempatan pada Bank lain, piutang murabahah, piutang istisna, piutang qard} ijarah,, piutang multijasa dan persediaan. Perkembangan aset (aktiva lancar) yang dimiliki oleh BPRS dapat dilihat pada gambar 4.4 di bawah ini:

Gambar 4.4
Total Aset (Aktiva Lancar) BPRS di Indonesia

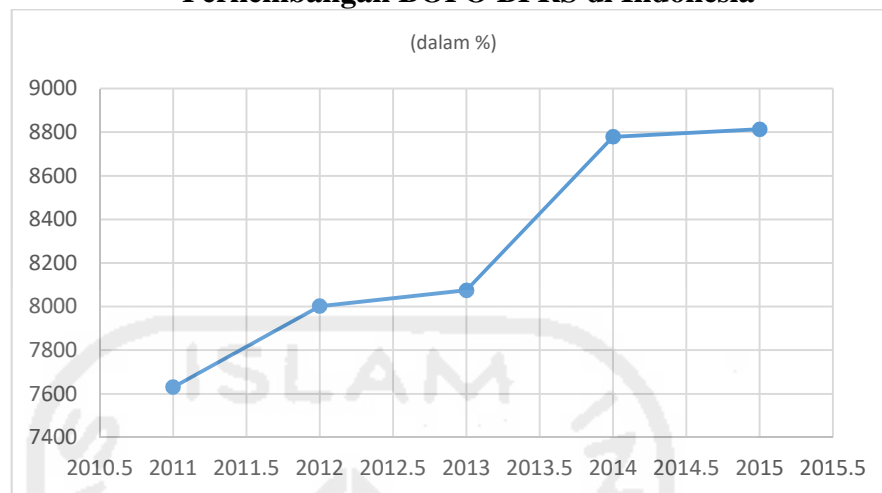


Sumber : Data diolah dari Statistik Perbankan Syariah 2015

4. Posisi Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

BOPO merupakan rasio beban operasional (beban bonus titipan *wadiah*, beban administrasi dan umum, biaya personalia, beban penyisihan penghapusan aktiva produktif dan beban lainnya) terhadap pendapatan personalia (pendapatan penyaluran dana, pendapatan dari DPK bukan Bank, pendapatan dari Bank Indonesia dan bank-bank lain di Indonesia). Perkembangan BPRS dapat dilihat dari rasio BOPO BPRS tersebut. BOPO merupakan indikator yang sering digunakan untuk menilai efisiensi bank dari penilaian rasio keuangan. BOPO yang semakin kecil mengidentifikasikan bahwa bank tersebut lebih efisien (secara produksi) karena mampu menghasilkan pendapatan yang lebih besar dengan biaya atau beban yang lebih sedikit.

Gambar 4.5
Perkembangan BOPO BPRS di Indonesia



Sumber : Data diolah dari Statistik Perbankan Syariah 2015

Pada gambar di atas diketahui bahwa perkembangan efisiensi BPRS dari nilai BOPO pada tahun 2011-2015 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dilihat dari nilai BOPO yang terus meningkat.

B. Hasil Analisis Data

1. Tingkat Efisiensi Kinerja Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia Tahun 2011 sampai Tahun 2015 Dengan Pendekatan *Data Envelopment Analysis*

Pada penelitian ini yang akan menampilkan efisiensi 113 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia. Melalui metode analisis *Data Envelopment Analysis* (DEA) selama tahun 2011 hingga 2015 maupun tingkat efisiensi rata-rata yang dicapai oleh masing-masing BPRS selama periode tersebut. Adapun data mengenai variabel *input* dan *output* dalam mengukur tingkat efisiensi didapatkan melalui laporan publikasi oleh Bank Indonesia. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa dalam metode DEA akan ditampilkan hasil pengukuran tingkat efisiensi melalui skor efisiensi dengan range 0-1 (1-100 persen). Skor 1

menggambarkan kemampuan suatu BPRS dalam mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki, sedangkan bila skor efisiensi semakin menjauhi 100 mengindikasikan suatu BPRS dapat dikatakan tidak efisien dalam mengoptimalkan sumber daya yang dimilikinya dan belum mampu menjalankan perannya sebagai lembaga intermediasi secara optimal. Pada tabel 4.1 di bawah ini akan menunjukkan BPRS yang memiliki efisiensi yang stabil pada tahun 2011-2015

Tabel 4.1
BPRS Efisien Stabil Tahun 2011-2015
Dengan Metode *DEA-VRS* Maksimasi *Output*

No.	BPRS Efisien	Provinsi
1	BPRS Harta Insan Karimah Parahyangan	Jawa Barat
2	BPRS Harta Insan Karimah	Banten
3	BPRS Oloan Ummah Sidempuan	Sumatera Utara
4	BPRS Rajasa	Lampung
5	BPRS Dinar Ashri	NTB

Sumber: Data diolah 2016

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa setelah dirata-ratakan tingkat efisiensi BPRS selama tahun 2011 hingga 2015 dalam sampel diketahui terdapat 5 BPRS yang paling efisien (efisiensi stabil) dengan nilai efisiensi 1-100%, sehingga dapat dijadikan referensi bagi BPRS yang berada dalam kondisi tidak efisien. Kelima BPRS yang dapat dijadikan referensi tersebut adalah BPRS Harta Insan Karimah Parahyangan di Provinsi Jawa Barat, Harta Insan Karimah di Provinsi Banten, BPRS Oloan Ummah Sidempuan di Provinsi Sumatera Utara, BPRS Rajasa di Provinsi Lampung dan BPRS Dinar Ashri di Provinsi NTB.

Berdasarkan perhitungan efisiensi dengan metode DEA dengan asumsi VRS yang dapat dilihat pada lampiran 13, menunjukkan tingkat efisiensi yang beragam dan fluktuatif pada sebagian besar BPRS. Maka, berdasarkan hasil pengukuran efisiensi tersebut dapat diketahui pada tahun 2011 terdapat 19 BPRS dalam sampel yang mampu mencapai tingkat efisiensi yang sempurna (nilai efisiensi $1 = 100\%$). Kesembilan belas BPRS tersebut adalah Bangun Drajat Warga, Margirizki Bahagia, Mitra Cahaya Indonesia, Barokah Dana Sejahtera, Dana Hidayatullah, Al-Madinah Tasikmalaya, Harta Insan Karimah Bekasi, Berkah Ramadhan, Harta Insan Karimah, Musyawarah Ummat Indo, al-hidayah, Bumi Rinjani Probolinggo, Jabal Nur, Oloan Ummah Sidempuan, Bangka, Rajasa, Ibadurrahman, Surya Sejati dan Dinar Ashri. Sedangkan 94 BPRS lainnya berada pada kondisi inefisien dan BPRS Mitra Harmoni Kota Bandung muncul sebagai BPRS yang paling tidak efisien pada tahun 2011 dengan tingkat efisiensi yang dicapai hanya 21,9 persen.

Sedangkan pada tahun 2012, terdapat 15 BPRS dalam sampel yang mampu mencapai tingkat efisiensi yang sempurna. Kelima belas BPRS tersebut adalah Harta Insan Karimah Parahyangan, PT BPRS Shadiq Amanah, Harta Insan Karimah, Musyawarah Ummat Indo, Cempaka Al-Amin, Dharma Kuwera, Unawi Barokah, al-hidayah, Bumi Rinjani Probolinggo, Oloan Ummah Sidempuan, Bangka, Rajasa, Surya Sejati, Tulen Amanah dan Dinar Ashri. Sedangkan 98 BPRS lainnya berada pada kondisi inefisien dan BPRS Mentari Pasaman Saiyo muncul sebagai BPRS

yang paling tidak efisien pada tahun 2012 dengan tingkat efisiensi yang dicapai hanya 14,6 persen.

Pada tahun 2013, terdapat 19 BPRS dalam sampel yang mampu mencapai tingkat efisiensi yang sempurna. Kesembilan belas BPRS tersebut adalah Madina Mandiri Sejahtera, Mitra Cahaya Indonesia, Harta Insan Karimah Parahyangan, Al-Madinah Tasikmalaya, PT BPRS Shadiq Amanah, Harta Insan Karimah Bekasi, Attaqwa Garuda Utama, Cilegon Mandiri, Harta Insan Karimah, Al-Mabrur, Dharma Kuwera, Bhakti Haji, Ar-Raihan, Oloan Ummah Sidempuan, Bangka, Rajasa, Way Kanan, Surya Sejati dan Dinar Ashri. Sedangkan 94 BPRS lainnya berada pada kondisi inefisien dan BPRS Ishlalul Ummah muncul sebagai BPRS yang paling tidak efisien pada tahun 2013 dengan tingkat efisiensi yang dicapai hanya 22,1 persen.

Pada tahun 2014, terdapat 17 BPRS dalam sampel yang mampu mencapai tingkat efisiensi yang sempurna. Ketujuh belas BPRS tersebut adalah Madina Mandiri Sejahtera, Artha Madani, Harta Insan Karimah Parahyangan, Al-Madinah Tasikmalaya, Harta Insan Karimah, Ben Salamah Abadi, Unawi Barokah, al-hidayah, Jabal Nur, Tanmiya Artha, Ar-Raihan, Oloan Ummah Sidempuan, Rajasa, Way Kanan, Surya Sejati, Dinar Ashri dan Syariat Fajar Sejahtera Bali. Sedangkan 96 BPRS lainnya berada pada kondisi inefisien dan BPRS Ibadurrahman muncul sebagai BPRS yang paling tidak efisien pada tahun 2014 dengan tingkat efisiensi yang dicapai hanya 31,1 persen.

Pada tahun 2015, terdapat 21 BPRS dalam sampel yang mampu mencapai tingkat efisiensi yang sempurna. Kedua puluh satu BPRS tersebut adalah Bangun Drajat Warga, Danagung Syariah, Mitra Cahaya Indonesia, Artha Madani, Harta Insan Karimah Parahyangan, Harta Insan Karimah Parahyangan, Al-Madinah Tasikmalaya, PT BPRS Shadiq Amanah, Cilegon Mandiri, Harta Insan Karimah, Ben Salamah Abadi, Khasanah Ummat, Unawi Barokah, al-hidayah, Bumi Rinjani Batu, Jabal Nur, Ar-Raihan, Oloan Ummah Sidempuan, Rajasa, Tulen Amanah, Dinar Ashri dan Syariat Fajar Sejahtera Bali. Sedangkan 92 BPRS lainnya berada pada kondisi inefisien dan BPRS Untung Surapati muncul sebagai BPRS yang paling tidak efisien pada tahun 2015 dengan tingkat efisiensi yang dicapai hanya 30,3 persen.

2. Target Perbaikan yang dilakukan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia untuk Mencapai Efisiensi Optimum

Selain untuk mengukur nilai efisiensi dari masing-masing BPRS yang ada dalam sampel, metode DEA juga dapat digunakan untuk memberikan referensi atau acuan BPRS bagi BPRS yang berada dalam kondisi inefisien agar mampu mencapai kondisi efisien. Selanjutnya, BPRS yang berada dalam kondisi inefisien dapat dikatakan bahwa BPRS tersebut belum dapat memaksimalkan nilai *input* dan *output* yang dimilikinya. Artinya bahwa nilai *input* dan *output* yang dicapai oleh BPRS yang inefisien belum dapat mencapai target yang sebenarnya masih dapat diraih. Sehubungan dengan itu, bagi BPRS yang inefisien untuk dapat mencapai efisiensi optimal 100 persen, dapat melakukan langkah

perbaikan sehingga dengan mencontoh tingkat penggunaan *input* seperti pada tingkat *input* yang digunakan oleh BPRS yang menjadi acuan perbaikannya sehingga dengan mencontoh tingkat penggunaan *input* ini, maka BPRS yang inefisien akan menjadi efisien 100 persen dengan mencapai target *output* yang maksimal seperti pada BPRS yang menjadi acuan perbaikannya.

Di bawah ini pada tabel 4.2, tabel 4.3, tabel 4.4, tabel 4.5 dan tabel 4.6 menyajikan nilai target pada masing-masing *input* dan *output* yang belum mampu dicapai oleh 10 BPRS yang memiliki nilai efisiensi terendah pada masing-masing tahunnya yaitu periode tahun 2011 hingga 2015. Sedangkan data lengkap yang menunjukkan nilai aktual dan target untuk masing-masing *input* dan *output* pada setiap BPRS yang mengalami inefisiensi pada tahun 2011-2015 terdapat pada lampiran 3 sampai lampiran 7.

Tabel 4.2
Perbandingan Nilai Aktual dan Target *Input* dan *Output*
Bagi BPRS Yang Inefisien Pada Tahun 2011

ID	Target (Ribuan Rp)				
	X ₁	X ₂	Y ₁	Y ₂	Y ₃
23	1.986.080	640.290	0	11.414.844	277.254
79	998.927	492.202	0	6.937.269	132.653
73	1.590.725	1.026.616	0	11.173.256	281.375
113	7.545.354	2.343.114	0	28.803.707	1.105.815
98	2.087.167	642.271	0	11.532.304	287.001
64	2.967.587	1.505.001	306.451	18.120.898	479.501
10	5.957.086	1.341.133	0	20301.066	774.475
74	2.061.923	526.519	208.100	7.856.243	215.132
12	2.037.271	787.144	132.914	12.369.279	287.384
83	780.597	471.231	0	4.159.772	83.241

Sumber: Data diolah 2016

Berdasarkan tabel 4.1 di atas dan lampiran 3 menunjukkan bahwa pada tahun 2011 terdapat 94 BPRS yang inefisien. Dengan ini dapat dilakukan target perbaikan yaitu dengan meningkatkan atau menurunkan nilai pada setiap variabel (indikator) *input* dan *output* yang dimiliki BPRS tersebut, diantaranya:

Variabel DPK ada 23 BPRS dapat menurunkan pencapaian DPKnya sehingga dana yang dihimpun tidak menumpuk atau dapat dikatakan ikhtikar sehingga dapat merusak perekonomian di Indonesia. Variabel biaya operasional ada 4 BPRS yang dapat menurunkan biaya operasionalnya sehingga biaya yang dikeluarkan tidak terjadi israf dan tabdzir dalam produksi hal ini berdasarkan *guidance* dalam mewujudkan efisiensi dalam Islam.

Variabel pembiayaan yang disalurkan ada 72 BPRS yang dapat meningkatkan pembiayaannya sehingga dapat meningkatkan perannya untuk mengembangkan usaha nasabah (UMKM) dan memberkan manfaat yang lebih besar kepada nasabah penabung dan nasabah pembiayaan dan 1 BPRS yang dapat menurunkan pembiayaannya untuk mengendalikan manajemen risiko perusahaan tersebut. Variabel aktiva lancar ada 87 BPRS yang dapat meningkatkan aktiva lancarnya sehingga BPRS dapat meningkatkan likuiditasnya dan 7 BPRS yang dapat menurunkannya sedangkan pada variabel pendapatan operasional lainnya. Selain itu, terdapat 80 BPRS yang dapat meningkatkannya dan 3BPRS yang dapat menurunkannya, sehingga dengan semakin meningkat

pendapat operasional lainnya dengan ini juga dapat meningkatkan kreativitas BPRS dalam menghindari transaksi bunga, hal ini disebabkan oleh pendapatan operasional lainnya merupakan pendapatan yang diperoleh selain dari pembiayaan sektor riil.

Tabel 4.3
Perbandingan Nilai Aktual dan Target *Input* dan *Output*
Bagi BPRS Yang Inefisien Pada Tahun 2012

ID	Target (Ribuan Rp)				
	X ₁	X ₂	Y ₁	Y ₂	Y ₃
96	5.644.021	1.689.900	4.261.827	46.959.086	832.840
64	4.812.269	1.441.087	3.478.099	38.522.527	674.637
113	10.310.055	4.171.409	0	62.612709	1.949.281
23	3.496.223	862.522	0	20.364.245	325.623
73	3.050.817	1.118.533	0	21.971.893	553.678
99	13.037.840	2.936.840	5.663.643	74.489.777	1.286.654
97	11.015.777	2.096.294	0	53.854.666	1.437011
107	7.205.580	2.536.732	1.941.055	37.035.419	1.828.027
100	3.607.447	1.100.714	2.590.870	27.777.850	260.834
10	7.478.806	1.331.942	3.235.033	36.635486	931.620

Sumber: Data diolah 2016

Berdasarkan table 4.3 di atas dan lampiran 4 menunjukkan bahwa pada tahun 2012 terdapat 98 BPRS yang tidak efisien. Dengan ini dapat dilakukan target perbaikan meningkatkan atau menurunkan nilai pada setiap variabel (indikator) *input* dan *output* yang dimiliki BPRS tersebut, diantaranya:

Variabel DPK ada 16 BPRS yang dapat menurunkan pencapaian DPKnya sehingga dana yang dihimpun tidak menumpuk atau dapat dikatakan ikhtikar sehingga dapat merusak perekonomian di Indonesia. Variabel biaya operasional ada 4 BPRS yang dapat menurunkan biaya operasionalnya sehingga biaya yang dikeluarkan tidak terjadi israf dan

tabdzjr dalam produksi hal ini berdasarkan *guidance* dalam mewujudkan efisiensi dalam Islam.

Variabel pembiayaan yang disalurkan ada 82 BPRS yang dapat meningkatkan pembiayaannya sehingga dapat meningkatkan perannya untuk mengembangkan usaha nasabah (UMKM) dan memberkan manfaat yang lebih besar kepada nasabah penabung dan nasabah pembiayaan. Variabel aktiva lancar ada 98 BPRS yang harus meningkatkan aktiva lancarnya sehingga BPRS dapat meningkatkan likuiditasnya. Selain itu, terdapat 98 BPRS yang dapat meningkatkan pendapatan operasional lainnya, sehingga dengan semakin meningkat pendapat operasional lainnya dengan ini juga dapat meningkatkan kreativitas BPRS dalam menghindari transaksi bunga, hal ini disebabkan oleh pendapatan operasional lainnya merupakan pendapatan yang diperoleh selain dari pembiayaan sector riil..

Tabel 4.4
Perbandingan Nilai Aktual dan Target *Input* dan *Output*
Bagi BPRS Yang Inefisien Pada Tahun 2013

ID	Target (Ribuan Rp)				
	X ₁	X ₂	Y ₁	Y ₂	Y ₃
26	3.333.758	1.599.292	930.738	15.493.562	377.465
77	3.436.921	1.126.203	802.680	14.609.448	264.346
43	4.377.169	2.134.414	3.085.472	14.887.129	591.703
23	3.333.758	1.599.292	120.000	13.937.740	226.619
99	16.196.775	3.538.809	671.843	45.652.305	1.520.199
40	1.511.154	1.131.816	587.050	6.579.176	306.432
113	4.131.863	3.882.046	0	14.661.327	1.753.849
93	13.337.879	3.185.536	0	40.407.311	1.05.593
107	6.931.447	1.808.689	384.269	17.394.298	1.097.690
109	28.566.142	11.047.757	0	88.809.167	6.092.452

Sumber: Data diolah 2016

Berdasarkan tabel 4.4 di atas dan lampiran 5, menunjukkan bahwa pada tahun 2013 terdapat 94 BPRS yang inefisien. Dengan ini dapat dilakukan target perbaikan meningkatkan atau menurunkan nilai pada setiap variabel (indikator) *input* dan *output* yang dimiliki BPRS tersebut, diantaranya:

Variabel DPK ada 1 BPRS yang dapat menurunkan pencapaian DPKnya. Variabel biaya operasional ada 4 BPRS yang dapat menurunkan biaya operasionalnya. Variabel pembiayaan yang disalurkan ada 74 BPRS yang dapat meningkatkan pembiayaannya. Variabel aktiva lancar ada 94 BPRS yang dapat meningkatkan aktiva lancarnya sedangkan pada variabel pendapatan operasional lainnya ada 94 BPRS yang dapat meningkatkan pendapatannya.

Tabel 4.5
Perbandingan Nilai Aktual dan Target *Input* dan *Output*
Bagi BPRS Yang Inefisien Pada Tahun 2014

ID	Target (Ribuan)				
	X ₁	X ₂	Y ₁	Y ₂	Y ₃
84	20.386.459	4.159.772	0	58.680.417	891.551
53	4.244.493	1.034.655	449.501	13.387.376	183.304
12	44.938.483	8.029.307	3.729.597	97.356.882	3.027.971
75	15.15.483	1.834.447	0	31.003.461	546.915
16	2.718.499	876.936	357.635	8.573878	197.554
21	27.527.492	3.967.492	1.443.182	56.815.389	1.546.230
9	15.334.371	1.434.846	1.716.046	19.509.054	732.039
64	5.674.645	1.800.581	759.224	24.585.805	302.674
106	23.110.789	2.328.695	1.246.420	41.006.727	767.937
70	10.758.063	1.818.922	2.042.353	25.560.314	464.372

Sumber: Data diolah 2016

Berdasarkan table 4.5 di atas dan lampiran 6, menunjukkan bahwa pada tahun 2014 terdapat 96 BPRS yang inefisien. Dengan ini dapat dilakukan target perbaikan meningkatkan atau menurunkan nilai pada

setiap variabel (indikator) *input* dan *output* yang dimiliki BPRS tersebut, diantaranya:

Variabel DPK ada 5 BPRS yang dapat menurunkan pencapaian DPKnya, variabel biaya operasional ada 3 BPRS yang dapat menurunkan biaya operasionalnya, variabel pembiayaan yang disalurkan ada 79 BPRS yang dapat meningkatkan pembiayaannya, variabel aktiva lancar ada 96 BPRS yang dapat meningkatkan aktiva lancarnya sedangkan pada variabel pendapatan operasional lainnya ada 96 BPRS yang dapat meningkatkan pendapatannya.

Tabel 4.6
Perbandingan Nilai Aktual dan Target *Input* dan *Output*
Bagi BPRS Yang Inefisien Pada Tahun 2015

ID	Target (Ribuan)				
	X ₁	X ₂	Y ₁	Y ₂	Y ₃
37	20.827.923	1.868.652	3.731.639	33.017.880	537.259
59	20.257.812	2.674.709	4.195.607	42.857.721	451.558
13	122.387.919	16.080.308	12.252.743	250.459.678	4.774.402
54	5.563.157	933.846	623.615	11.142.625	148.970
15	12.173.204	2.229.746	3.134.950	29.887.425	339.864
76	7.104.038	1.380.615	1.414.654	16.633.691	307.688
10	16.668.424	2.400.132	2.011.606	33.648.368	823.362
107	4.991.436	2.122.337	393.732	12.885.831	720.260
2	35.369.124	2.501.304	9.951.230	47.766.505	429.349
48	32.240.335	2.313.816	9.479.880	48.591.994	432.004

Sumber: Data diolah 2016

Berdasarkan table 4.6 di atas dan lampiran 7, dapat diketahui bahwa pada tahun 2015 terdapat 92 BPRS yang inefisien. Dengan ini dapat dilakukan target perbaikan meningkatkan atau menurunkan nilai pada setiap variabel (indikator) *input* dan *output* yang dimiliki BPRS tersebut, diantaranya:

Variabel DPK ada 92 BPRS yang dapat meningkatkan pencapaian DPKnya, variabel biaya operasional ada 92 BPRS yang dapat menurunkan biaya operasionalnya, variabel pembiayaan yang disalurkan ada 71 BPRS yang dapat meningkatkan pembiayaannya dan 21 BPRS yang dapat menurunkannya, variabel aktiva lancar ada 90 BPRS yang dapat meningkatkan aktiva lancarnya dan 2 BPRS yang dapat menurunkannya sedangkan pada variabel pendapatan operasional lainnya ada 92 BPRS yang dapat meningkatkan pendapatannya.

3. Tingkat Kinerja Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia dari Tahun 2011 sampai Tahun 2015 Dengan Pendekatan *Sharia Maqasid Index* (SMI)

a. Kinerja *Maqasid Syariah* BPRS

Rasio kinerja *maqasid syariah* setiap BPRS merupakan ukuran untuk menentukan bagaimana bank melaksanakan tujuan-tujuan syariah yang telah ditentukan. Untuk mengetahui sejauh mana BPRS melaksanakan setiap tujuan-tujuan *maqasid Syari'ah* dapat diukur melalui rasio kinerja *maqasid Syari'ah* yang telah dibagi menjadi tiga tujuan yaitu:

- 1) Mendidik individu (*Tahzib al-fardiy*)
- 2) Menegakkan keadilan (*lqomat al-adl*)
- 3) Kemaslahatan (*Jaib al-maslahah*)

Berdasarkan rasio kinerja *maqasid syariah* dari 113 BPRS untuk Tujuan 1, Tujuan 2 dan Tujuan 3 menghasilkan BPRS yang memiliki nilai tertinggi pada setiap rasionya yang dalam hal ini menunjukkan

kemampuan perusahaan dalam melaksanakan fungsi syariahnya yang diukur melalui 10 rasio kinerja :

1) Tujuan Pertama : Mendidik Manusia (Tahzib al-fard)

Tujuan pertama maqasid syari'ah adalah mendidik manusia, terdapat tiga aspek pengukuran yang digunakan dalam mengukur sejauh mana BPRS melaksanakan tujuannya dalam mendidik manusia, antara lain: *advancement knowledge, instilling new skill and improvement and creating awareness of Islamic banking*. Sehingga dari tabel 4.7 di atas dapat diketahui bahwa untuk hibah pendidikan dan pelatihan (*education grant dan training expense*) ditunjukkan oleh R_{11}, R_{31} yang diperoleh dari beban personalia. Maka dapat diketahui bahwa BPRS Kota Juang menjadi BPRS dengan rasio tertinggi yaitu mencapai rasio 0,9188 atau 91,88%. Rasio ini menunjukkan tingginya kepedulian BPRS Kota Juang terhadap pendidikan dan perkembangan karyawannya.

Rasio selanjutnya untuk penelitian dan publikasi (*research expense dan publicity expense*) ditunjukkan oleh R_{21}, R_{41} diperoleh dari beban administrasi dan umum. Maka dapat diketahui bahwa BPRS Bumi Artha Sampang menjadi BPRS dengan rasio tertinggi yaitu mencapai 0,8594 atau 85,94%. Hal ini menunjukkan bahwa tingginya kepedulian BPRS Bumi Artha Sampang dalam memberikan informasi kepada masyarakat atau pemangku kepentingan mengenai produk syariah.

2) Tujuan Kedua : Menegakkan Keadilan (Iqomat al-adl)

Pada tujuan kedua *maqasid syari'ah* ini ada tiga rasio pengukuran yang digunakan dalam mengukur sejauh mana BPRS melaksanakan tujuannya dalam menegakkan keadilan dalam rangka komitmen bank untuk menegakkan keadilan ekonomi dan tercipta hubungan yang saling menguntungkan antara bank dengan masyarakat, antara lain: *fair returns, cheap products and services* dan *elimination injustice*.

Dari tabel 4.7 di atas pada rasio R_{12} yang merupakan rasio pertama tujuan ke-2 yaitu *fair return* tidak dapat dihitung, karena ukuran yang digunakan untuk menghitung rasio ini menggunakan rasio *Profit Equalization Reserve (PER)*, seperti yang diketahui bahwa BPRS tidak melaporkan alokasi dana untuk PER pada laporan keuangannya. Hal ini dilakukan karena apabila BPRS menempatkan sebagian penetapannya untuk PER maka bank dianggap memungkirkan hak deposan atas keuntungannya.

Rasio kedua tujuan kedua yang ditunjukkan oleh R_{22} yaitu rasio *functional distribution*, hasil perhitungan rasio kedua ini dihitung dari rasio pembiayaan dengan skim bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*) terhadap skim lainnya menunjukkan bahwa ada 26 BPRS yang memperoleh dengan nilai tertinggi dengan nilai 1 atau 100% diantaranya BPRS Mitra Cahaya Indonesia, Mitra Hamoni Yogyakarta, Artha Fisabilillah, Mitra Harmoni Kota Bandung, Al-

Wadiah, Al-Madinah Tasikmalaya, Bina Amwalul Hasanah, Mulia berkah Abadi, Anisa Mukti, Bumi Rinjani Kepanjen, Bumi Rinjani Probolinggo, BPRS Rahma Syariah, Bumi Rinjani Batu, Baiturahman, Tengku Chiek Dipante, Rahmania Dana Sejahtera, Hikmah Wakilah, Adeco, Ar-Raihan, Sindanglaya Katonapan, Oloan Ummah Sidempuan, Al-Makmur, Tanggamus, Ibadurahman, Surya Sejati dan Syariat Fajar Sejahtera Bali. Hal ini menunjukkan bahwa 26 BPRS tersebut menyalurkan pembiayaannya 100% menggunakan skim bagi hasil (mudharabah dan musyarakah).

Rasio ketiga tujuan kedua ditunjukkan oleh R_{32} yaitu rasio *interest free income* menunjukkan bahwa BPRS di Indonesia masih menjalankan aktivitas yang mengandung riba. BPRS yang paling mendekati dari transaksi yang bebas riba atau yang memperoleh nilai tertinggi adalah BPRS Madina Mandiri Sejahtera dengan rasio 0,3958 atau 39,58%. Riba (suku bunga) merupakan salah satu instrumen yang dilarang dalam sistem perbankan dan keuangan syariah. Hal ini disebabkan karena riba memberikan dampak buruk terhadap perekonomian dan menyebabkan ketidakadilan dalam transaksi ekonomi. Sehingga sebagai lembaga keuangan yang didasarkan pada syariat Islam, BPRS dituntut untuk menjalankan aktivitas perbankan yang dilakukan adalah aktivitas yang terbebas dari riba.

3) Tujuan Ketiga : Kemaslahatan (Jaib al-maslahah)

Pada tujuan ketiga *maqasid syari'ah* ini ada tiga rasio pengukuran yang digunakan dalam mengukur sejauh mana BPRS melaksanakan tujuannya dalam mewujudkan kemaslahatan umat, antara lain: *profit Ratios*, *personal income* dan *investement ratios in real sectors*. Dari tabel 4.7 di atas pada rasio R_{13} yang merupakan rasio pertama tujuan ketiga hasil perhitungan rasio kedua ini dihitung dari pendapatan bersih terhadap total aktiva (*net income/ total asset*) menunjukkan bahwa BPRS Sindanglaya Katonapan memperoleh nilai tertinggi dengan rasio sebesar 0,0849 atau 8,49%. Hal ini menunjukkan bahwa BPRS Sindanglaya Katonapan memiliki kemampuan aset yang dikelola dengan baik sehingga menghasilkan pendapatan bersih sebesar 8,49% dari total aset. BPRS yang memiliki kemampuan untuk mengelola kekayaan dengan baik secara optimal dan bijaksana dengan tujuan untuk memperoleh laba yang tinggi merupakan salah satu perwujudan dari *hifzul maal* (penjagaan terhadap harta). Perolehan laba yang maksimal dapat memungkinkan BPRS berkontribusi lebih terhadap pajak untuk pembangunan negara serta memungkinkan berkontribusi yang lebih besar untuk kemaslahatan masyarakat.

Rasio kedua tujuan ketiga yang ditunjukkan oleh R_{23} yaitu rasio *personal income*, hasil perhitungan rasio kedua ini dihitung dari rasio zakat yang dikeluarkan oleh BPRS terhadap aset bersih

(*zakat paid/net asset*) menunjukkan bahwa BPRS Harta Insan Karimah Parahyangan dengan rasio tertinggi sebesar 0,0026 atau 0,26%. Pada perhitungannya digunakannya *net asset* sebagai pembagi, karena dianggap lebih mencerminkan kekayaan yang dimiliki BPRS diharapkan dapat juga meningkatkan nominal pembayaran zakatnya.

Rasio ketiga tujuan ketiga yang ditunjukkan oleh R_{33} yaitu rasio *investment in real sector*, hasil perhitungan rasio ketiga ini dihitung dari rasio investasi yang dilakukan oleh BPRS di sektor riil dibandingkan dengan keseluruhan investasi yang dilakukan BPRS. Dalam rasio ini tidak dapat dihitung karena BPRS sebagai lembaga keuangan yang termasuk dalam lembaga keuangan mikro yang tidak melakukan investasi di sektor riil.

b. Indikator Kinerja BPRS di Indonesia

Setelah diketahui hasil perhitungan rasio kinerja maqasid syari'ah dari masing-masing BPRS, selanjutnya adalah menentukan peringkat kinerja maqasid syari'ah dari setiap BPRS. Proses tersebut dilakukan melalui Indikator Kinerja (IK) setiap BPRS. Proses tersebut menggunakan *Simple Additive Weighting Method* (SAW) dengan cara pembobotan, agregat dan proses menentukan peringkat (*weighting, aggregating and ranking processes*). Berikut ini adalah Indikator Kinerja Setiap BPRS berdasarkan tujuan-tujuan maqasid syari'ah yang digambarkan pada lampiran 8 sampai dengan 12:

Indikator kinerja untuk tujuan pertama dapat diketahui bahwa BPRS Dana Moneter di Provinsi Sulawesi Selatan lebih baik dari pada BPRS lain di Indonesia dengan nilai Indikator kinerja sebesar 26,89%. Maka dengan ini menunjukkan bahwa BPRS Dana Moneter ikut serta berperan dalam merancang program pendidikan dan pelatihan dengan nilai-nilai moral sehingga mereka akan mampu meningkatkan kemampuan keahlian karyawan serta berperan dalam mengembangkan pengetahuan masyarakat.

Sedangkan untuk indikator kinerja tujuan kedua dapat diketahui bahwa BPRS Cilegon Mandiri di Provinsi Banten lebih baik dari pada BPRS lain di Indonesia dengan nilai indikator kinerja sebesar 23,09%. Maka dengan ini menunjukkan bahwa BPRS Cilegon Mandiri dapat melakukan transaksi secara adil dalam sosial ekonomi melalui transaksi bagi hasil yang berakibat pada tidak merugikan nasabah.

Indikator kinerja untuk tujuan ketiga dapat diketahui juga bahwa BPRS Sindanglaya Katonapan di Provinsi Sumatra Utara lebih baik dari pada BPRS lain di Indonesia dengan nilai indikator kinerja sebesar 0,81% hal ini masih jauh dari nilai baik. Dengan indikator kinerja tujuan ketiga ini menunjukkan bahwa BPRS mampu mewujudkan kemaslahatan yang tidak hanya dimiliki oleh pemilik dan pegawainya, tetapi berdampak pada semua golongan atau mampu mengembangkan proyek investasi dan pelayanan sosial untuk meningkatkan kemaslahatan masyarakat.

c. *Sharia Maqasid Index (SMI) BPRS di Indonesia*

Sharia Maqasid Index (SMI) merupakan total dari semua indikator kinerja maqasid syari'ah BPRS untuk ketiga tujuan (tujuan 1-3), yaitu tujuan mendidik manusia, menciptakan keadilan dan menciptakan kemaslahatan. Berikut ini merupakan tabel yang menunjukkan nilai *Sharia Maqasid Index (SMI)* pada 20 BPRS di Indonesia sedangkan data lengkap untuk 113 BPRS di Indonesia yang menjadi objek penelitian periode 2011-2015 dapat dilihat pada lampiran 14.

Tabel 4.7
Sharia Maqasid Index (SMI) BPRS di Indonesia Tahun 2011-2015

NO.	NILAI SMI					RATA-RATA
	2011	2012	2013	2014	2015	
	1	2	3	4	5	6
1	0.2496	0.5387	0.2552	0.2389	0.2416	0.3048
2	0.2710	0.5765	0.2631	0.2825	0.2769	0.3340
3	0.2717	0.5766	0.2606	0.2675	0.2613	0.3275
4	0.2345	0.4669	0.2749	0.2815	0.2827	0.3081
5	0.2302	0.6067	0.2920	0.2780	0.2331	0.3280
6	0.1924	0.3904	0.2126	0.2198	0.1754	0.2381
7	0.3006	0.6467	0.2771	0.2420	0.2701	0.3473
8	0.2605	0.5310	0.2738	0.2565	0.2755	0.3195
9	0.2297	0.4670	0.2545	0.2961	0.2747	0.3044
10	0.1566	0.6676	0.2913	0.2918	0.2926	0.3400
11	0.2677	0.5850	0.2568	0.2205	0.2459	0.3152
12	0.2549	0.5451	0.2424	0.2481	0.2534	0.3088
13	0.1098	0.1850	0.1274	0.1270	0.1842	0.1467
14	0.2367	0.5407	0.3265	0.1983	0.2484	0.3101
15	0.1492	0.2558	0.2364	0.2329	0.2575	0.2264
16	0.1986	0.3462	0.1073	0.1266	0.1528	0.1863
17	0.1569	0.3001	0.2701	0.2565	0.0842	0.2136
18	0.2452	0.5485	0.2232	0.1488	0.1908	0.2713
19	0.1431	0.5301	0.2546	0.2361	0.2504	0.2829
20	0.1030	0.2501	0.1534	0.1480	0.1816	0.1672

Sumber: Data diolah 2016

Dari gambar 4.7 di atas dan lampiran 14, menunjukkan bahwa dari 11 BPRS di Indonesia yang menjadi BPRS dengan nilai *Sharia Maqasid Index* (SMI) tertinggi adalah BPRS Bumi Artha Sampang dengan total nilai 41,57%. Hal ini menunjukkan bahwa BPRS Bumi Artha Sampang di Provinsi Jawa Tengah memiliki nilai tertinggi dalam ukuran kinerja yang berperan sebagai lembaga intermediasi yang sesuai dengan tujuannya. Yang mana BPRS sebagai lembaga keuangan syariah yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan (laba) akan tetapi terdapat nilai pendidikan, keadilan dan kesejahteraan masyarakat yang mencerminkan ukuran manfaat non profit yang sesuai dengan tujuan bank syariah.

Sedangkan BPRS yang memiliki nilai terendah pada tingkat *Sharia Maqasid Index* adalah BPRS Syariat Fajar Sejahtera Bali di Provinsi dengan nilai SMI sebesar 11,38%.

C. Pembahasan

Pada bagian ini akan dilakukan pembahasan dari hasil pengukuran efisiensi kinerja Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan *Data Envelopment Analysis* (DEA) dan *Sharia Maqasid Index* (SMI) di atas. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan sebelumnya dapat diketahui bahwa nilai efisiensi kinerja dengan pendekatan *Data Envelopment Analysis* (DEA) menghasilkan BPRS dengan nilai efisiensi 1 atau 100% selama periode 2011 hingga 2015 adalah BPRS Harta Insan Karimah Parahyangan di Provinsi Jawa Barat, Harta Insan

Karimah di Provinsi Banten, BPRS Oloan Ummah Sidempuan di Provinsi Sumatra Utara, BPRS Rajasa di Provinsi Lampung dan BPRS Dinar Ashri di Provinsi NTB. Sedangkan hasil pengukuran kinerja dengan pendekatan *Sharia Maqasid Index* (SMI) menghasilkan BPRS Bumi Artha Sampang di Provinsi Jawa Tengah dengan nilai SMI sebesar 41,57%.

Berdasarkan pengukuran efisiensi, selain mengukur kinerja BPRS dengan pengukuran keuangan dapat meningkatkan peran BPRS dalam pengembangan masyarakat. Hal ini didukung oleh Muhari dan Hosen yang menyatakan bahwa tujuan utama lembaga keuangan syariah yaitu komersial dan pengembangan masyarakat. Komersial artinya BPRS dalam menjalankan usahanya harus memperoleh keuntungan agar aktiva dapat terjaga (*sustainable*) dan kemampuan melayani nasabah semakin meningkat (*outreach*)¹. Hal ini berarti jika komersial tercapai maka dengan sendirinya kemampuan untuk melayani masyarakat atau pengembangan masyarakat akan tercapai. Akan tetapi, untuk mencapai kesempurnaan dalam pencapaian tujuan utamanya ini, maka diperlukan pengukuran yang tidak hanya bersandar pada patokan keuangan sebagai ukuran kinerja perusahaan.

Berdasarkan efisiensi dalam Islam, bahwa efisiensi ini yang memiliki tujuan untuk mengoptimalkan keuntungan tidak dikenal karena hal ini dapat mengakibatkan perbuatan dzalim. Dalam Islam, perwujudan keuntungan yang optimal dihasilkan melalui sesuatu secara optimal dengan tetap menjaga keseimbangan antara kerja keras dan beban yang dikeluarkan. Jika

¹Syafaat Muhari dan Muhammad Nadrattuzaman Hosen, "Tingkat...", hlm. 208

pengukuran efisiensi memiliki indikator *Islamic Wordview* atau memenuhi *guidance* pada efisiensi dalam Islam, dengan ini BPRS yang sebagai entitas bisnis syariah dapat mengoptimalkan fungsi syariahnya. Hal ini dapat dilihat salah satunya pada indikator variabel *output* pada pendekatan *Data Envelopment Analysis* (DEA) dan rasio kedua tujuan kedua pada pendekatan *Sharia Maqasid Index* (SMI) yaitu pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Hal ini menunjukkan semakin tinggi pembiayaan yang disalurkan dengan menggunakan pendekatan DEA akan berdampak peningkatan BPRS untuk melayani nasabah dan meningkatkan usaha nasabah (UMKM) serta dapat meningkatkan perannya sebagai lembaga intermediasi, sedangkan pada pendekatan SMI dengan rasio yang tinggi pada rasio menegakkan keadilan yang dengan ini menunjukkan bahwa BPRS mewujudkan keadilan sosial ekonomi melalui transaksi bagi hasilnya.

Berdasarkan pengukuran efisiensi kinerja yang dilakukan dengan pendekatan *Data Envelopment Analysis* (DEA) dan *Sharia Maqasid Index* (SMI) pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dapat diketahui bahwa dalam pengukuran kinerja BPRS akan lebih baik jika menggunakan kedua pendekatan tersebut.

Berdasarkan pengertiannya bahwa pengukuran kinerja menurut Yuwono merupakan bagian dari sistem pengendalian manajemen yang mencakup tindakan keputusan perusahaan, penilaian kinerja dan operasi karyawan. Penilaian kinerja adalah alat manajemen untuk menentukan seberapa jauh tujuan perusahaan yang telah dicapai, mengevaluasi kinerja

bisnis, manajer, divisi dan individu dalam perusahaan serta memprediksi harapan perusahaan di masa depan. Kinerja yang unggul ditandai dengan efektif dan efisien. Sistem pengukuran kinerja yang handal merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan organisasi.² Maka diperlukannya pengukuran kinerja dengan menggunakan kedua pendekatan ini.

Hal tersebut di atas juga dapat dilihat pada peringkat BPRS yang memiliki efisiensi optimal dan memiliki skor *maqasid index* yang tinggi, keduanya tidak memiliki hubungan yang positif walaupun memiliki variabel yang berpengaruh terhadap masing-masing pengukuran. Dengan demikian, diperlukannya kedua pengukuran tersebut (DEA dan SMI) dalam mengevaluasi kinerja BPRS melalui pengukuran kinerja. Untuk memiliki korelasi yang signifikan, maka diperlukan variabel yang saling keterkaitan antara kedua pendekatan yaitu pada pendekatan DEA dapat menggunakan tolok ukur yang sesuai dengan tujuan syariah atau terdapat unsur *Islamic Wordview* dalam variabel *input* dan *outputnya*.

Berdasarkan informasi yang digunakan, jika perusahaan menggunakan pengukuran yang hanya bersandarkan pada pengukuran keuangan memiliki tiga kelemahan, diantaranya:

1. Penggunaan kinerja keuangan sebagai satu-satunya ukuran kinerja perusahaan dapat mendorong manajer untuk mengambil tindakan jangka pendek dan mengabaikan rencana jangka panjang.

²M. Syafi'I Antonio, dkk., "An Analysis of...", hlm. 13-14

2. Mengabaikan aspek pengukuran non keuangan dan asset tidak berwujud, baik dari internal maupun eksternal akan memberikan pandangan keliru dari para manajer perusahaan di masa sekarang bahkan masa yang akan datang.
3. Kinerja keuangan yang hanya didasarkan pada kinerja masa lalu kurang mampu membawa perusahaan terhadap tujuan perusahaan.³

Maka diperlukan pula pengukuran yang dapat mengukur kinerja perusahaan yang lebih diarahkan pada tujuan dan sasaran dari syariah yang merupakan tujuan utama dari lembaga keuangan syariah. Hal ini pula yang menjadikan perbedaan mendasar lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional. Seperti halnya, menurut Omar tolok ukur konvensional dalam mengukur perbankan syariah terdapat ketidak sesuaian antara indikator kinerja konvensional dengan tujuan syariah atau tujuan perbankan syariah yang lebih luas.⁴

Pengukuran kinerja dengan menggunakan pendekatan *Sharia Maqasid Index* (SMI) adalah pengukuran kinerja perbankan syariah yang sesuai dengan tujuan dan karakteristik perbankan syariah yang dikembangkan pada tiga faktor utama, yaitu pendidikan, penciptaan keadilan dan pencapaian kesejahteraan. Dengan pengukuran ini BPRS dapat menjadikan acuan untuk mampu merancang program pendidikan dan pelatihan dengan nilai-nilai moral sehingga mampu meningkatkan kemampuan dan keahlian para karyawan, memastikan kejujuran dan keadilan dalam semua transaksi dan kegiatan usaha

³M. Syafi'I Antonio, dkk., "An Analysis of...", hlm. 14

⁴Mustafa Omar Mohammed dan Dzuljastri Abdul Razak, "The Performance....", hlm. 2-3

yang tercakup dalam produk seluruh aktifitas *free interest* serta mengembangkan proyek-proyek investasi dan pelayanan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan indikator kinerja Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang diperkenalkan oleh Zeller dan Meyer dengan konsep *The Triangle of Microfinance*, ketiga indikator tersebut diantaranya kesinambungan keuangan (*financial sustainability*), tingkat jangkauan (*outreach*) dan dampak keberadaan LKM terhadap lingkungan (*impact*). Indikator kesinambungan keuangan dapat diukur dengan melihat perkembangan penggunaan biaya dan nilai keuntungan yang dihasilkan oleh BPRS. Tingkat jangkauan dilihat berdasarkan perkembangan jumlah nasabah dan dana pihak ketiga yang dapat dikumpulkan oleh BPRS, serta seberapa luas wilayah kerja BPRS tersebut. Peran BPRS dalam pengembangan masyarakat dan sebagai sumber pembiayaan UMKM yang berada di wilayah kerjanya merupakan dampak keberadaan BPRS terhadap lingkungan. Ketiga indikator kinerja ini dapat juga diukur secara bersamaan dengan pendekatan *Data Envelopment Analysis* dan *Sharia Maqasid Index* (SMI).

Sebagai entitas bisnis syariah, BPRS tidak hanya dituntut sebagai perusahaan yang mencari keuntungan belaka, akan tetapi juga harus menjalankan fungsi dan tujuannya sebagai sebuah entitas syariah yang dilandaskan pada konsep *maqasid syariah*.⁵ Oleh karena itu, BPRS berbeda dengan perbankan konvensional dalam pengukuran kinerjanya yang tidak

⁵Afrinaldi, "Analisa Kinerja...", hlm. 2

hanya terbatas pada rasio keuangan akan tetapi berdasarkan indikator ekonomi, lingkungan dan social. Maka pengukuran efisiensi kinerja dengan pendekatan *Sharia Maqasid Index* (SMI) memiliki pengukuran yang kompleks yang tidak hanya berfokus pada keuntungan atau *profit* berlaka, akan tetapi manfaatnya bagi pemegang saham dan masyarakat di lingkungannya. Hal ini didukung oleh penelitian Syafi'i Antonio dkk, yang menunjukkan bahwa pendekatan *Sharia Maqasid Index* (SMI) menjadi pendekatan alternatif yang strategis yang dapat menggambarkan seberapa baik kinerja Lembaga Keuangan yang lebih universal dan dapat diimplementasikan dalam bentuk strategi kebijakan yang komprehensif.⁶

Maka, untuk mencapai keberhasilan organisasi yang mampu bertahan dalam menghadapi ketatnya persaingan industri keuangan di Indonesia maka diperlukan sistem pengukuran kinerja yang handal. Sistem pengukuran kinerja yang dapat digunakan untuk pengukuran efisiensi kinerja Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah *Data Envelopment Analysis* dan *Sharia Maqasid Index*.

⁶Muhammad Syafi'I Antonio, dkk, "An Analysis...."